
KONVENSI PBB TENTANG HUMAN TRAFFICKING: EKSPLOITASI SEKSUAL PEREMPUAN DI FILIPINA TAHUN 2016-2019

Harun Umar^{1*}, Christabel Jeannette Kusumadewi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Nasional, Jakarta
Email: harunumar53@gmail.com, christabelj17@gmail.com.

*Korespondensi: harunumar53@gmail.com

(Submission 14-10-2021, Revisions 19-10-2021, Accepted 25-10-2021).

Abstract

This study aims to determine the impact of human trafficking around the world, especially around the Philippines. Where people and mostly children or teenagers, minors are trafficked to other cities or sent to other countries. Human trafficking is a serious problem that has not been fully resolved. So many victims from all continents lost their documents or passports even reported themselves to the countries where they were trafficked. Prostitution is a big problem where human trafficking begins, the victims are forced to work as prostitutes and given drugs so that the victims will be intoxicated with drugs in their bodies. This research shows that it causes economic inequality in the Philippines, young children are forced to work 20 hours a day every day without getting paid. This is a real world problem. Children who are mistreated by adults and they have permission through the victim's family. Human rights must be achieved in these developing countries for the main outcome of human trafficking in Southeast Asia.

Keywords: *human trafficking, ham, philippines, asia, united nations.*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak perdagangan manusia di seluruh dunia, khususnya di sekitar Filipina. Dimana orang-orang dan kebanyakan anak-anak atau remaja, orang-orang di bawah umur diperdagangkan ke kota lain atau dikirim ke negara lain. Perdagangan manusia adalah masalah serius yang belum terselesaikan sepenuhnya. Begitu banyak korban dari semua benua kehilangan dokumen atau paspor mereka bahkan melaporkan diri mereka sendiri ke negara tempat mereka diperdagangkan. Prostitusi adalah masalah besar dimana mulai terjadinya perdagangan manusia, para korban dipaksa bekerja sebagai pelacur dan diberi obat bius sehingga para korban tersebut akan dimabukkan dengan obat-obatan di dalam tubuh mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa hal itu menyebabkan ketimpangan ekonomi di Filipina, anak-anak kecil yang dipaksa bekerja 20 jam sehari setiap hari tanpa dibayar. Ini adalah masalah dunia yang sebenarnya. Anak-anak yang diperlakukan buruk oleh orang dewasa dan mereka memiliki izin melalui keluarga korban. Hak asasi manusia harus dicapai di negara berkembang tersebut untuk hasil utama perdagangan manusia di Asia Tenggara.

Kata Kunci: perdagangan manusia, ham, filipina, asia, pbb

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia yang terjadi di seluruh dunia bisa disebut sebagai proses, proses tunggal yang bisa dilihat sebagai pelanggaran dalam hukum Hak Asasi Manusia yang sudah dibuatkan dan juga dijunjung dengan erat oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Swedia, Belanda, Norwegia, Denmark, Indonesia, dan negara lainnya yang mempererat Hak Asasi Manusia. Seperti yang bisa dilihat tidak semua negara di dunia menjalani Hak Asasi Manusia yang ada dalam law tersebut.

Dalam perdagangan manusia melibatkan penculikan atau perekrutan seseorang diikuti dengan pengangkutan dan masuknya individu tersebut ke negara lain yang bersifat memaksa. Prostitusi paksa dan kekerasan juga dilibatkan dalam perdagangan atau penjualan manusia ini oleh sebuah komunitas atau organisasi yang memiliki power atas *korban trafficking* tersebut. Prostitusi yang terjadi dalam sebuah strip club, tempat urut ataupun tempat escort prostitutions memiliki banyak korban yang diculik secara paksa dan tidak memiliki identitas yang seharusnya dimiliki korban tersebut sebagai warga negara atau masyarakat sipil. Komunitas atau organisasi perdagangan manusia memiliki sebuah kontrol terhadap korban maka dari itu, korban trafficking tersebut tidak bisa untuk mencoba kabur dari penculikan atau prostitusi paksa tersebut. Kejahatan yang dilakukan terhadap korban individu selama proses perdagangan termasuk ancaman, pemerasan, pencurian dokumen atau properti, pemenjaraan palsu, pelecehan seksual atau pelecehan seksual, germo, pemerkosaan, dan bahkan kematian. Pelanggaran terhadap Negara termasuk penyalahgunaan undang-undang imigrasi, pemalsuan dokumen, korupsi pejabat pemerintah, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Obat-obatan terlarang juga termasuk dalam operasi perdagangan manusia ini, agar korban tidak bisa melarikan diri, penculik tersebut memberikan narkoba dalam tubuh atau pil di makanan ataupun minuman korban.

Perdagangan manusia adalah industri kriminal yang tumbuh paling cepat di dunia dan mayoritas dari korban perdagangan manusia kebanyakan perempuan, karena perempuan adalah target termudah untuk para *trafficker*. Perdagangan manusia adalah masalah yang sangat serius di seluruh dunia yang belum pernah diselesaikan bahkan oleh organisasi secara tuntas. Perdagangan manusia bukan hanya sebuah *forced prostitution, sexual assault, threat atau theft of documents* tetapi juga berupa *false promises* seperti yang terjadi di Southeast Asia yaitu negara Filipina, anak-anak. dijanjikan sebuah pekerjaan yang bisa membantu keluarga mereka yang sangat kekurangan di sebuah desa, dan beberapa kasus yang terjadi anak dibawah umur ikut dengan sebuah *agency* atau seseorang yang tidak begitu dikenal dan mereka dipindahkan ke sebuah pabrik dan disuruh kerja paksa selama 20 jam tanpa istirahat, tanpa gaji yang dijanjikan juga oleh oknum tersebut. Dalam perdagangan manusia banyak anak-anak yang masih dibawah umur sudah diperdagangkan akibat keluarga mereka yang tidak mampu dan memiliki tuntutan untuk menafkahi keluarga besar korban. Perdagangan manusia memiliki cangkupan

atau networking yang begitu luas dan susah untuk dibongkar secara dalam karena adanya komunitas, mucikari atau mafia.

Di seluruh dunia, masih ada kasus-kasus perdagangan manusia, seperti di Eropa maupun Asia Tenggara, Amerika Serikat dan Kanada, korban penjual-belian manusia masih terus terjadi sampai detik ini, dalam documentary tentang human trafficking korban-korban eksploitasi memiliki banyak faktor yaitu karena perekonomian atau ketimpangan ekonomi yang ada dalam kehidupan pribadi dan negara-negara Asia Tenggara yang kemiskinannya terus meningkat dan berdampak kepada keluarga yang memperjualbelikan anak-anak mereka dibawah umur untuk melakukan aktivitas prostitusi untuk membiayai kelangsungan hidup keluarga korban. Hampir semua korban dalam kasus yang terdata oleh Pemerintah Filipina menggunakan layanan perekrut atau agensi perjalanan dan memiliki persyaratan yang harus ditandatangani untuk meninggalkan negara secara sukarela.

Mayoritas ditipu setelah memasuki negara tujuan, sebagian besar korban direkrut untuk bekerja sebagai “penghibur” tapi akhirnya dieksploitasi secara seksual dan dipaksa bekerja sebagai penari telanjang, klub malam atau hostess karaoke atau prostitute. Para korban melaporkan kepada mereka pejabat pemerintah bahwa mereka tidak menyetujui secara fisik dan kontak seksual dan bentuk kekerasan lainnya yang dilakukan oleh penikmat terhadap korban kekerasan seksual atau korban *human trafficking* tersebut. Dan sebagian besar korban yang menggunakan perekrut dari Filipina diperdagangkan ke Korea.

Penyelundupan dan perdagangan manusia kembali ke definisi yang ditetapkan dalam Protokol Perdagangan Manusia PBB, para korban perdagangan orang direkrut melalui ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, dan penipuan; melalui penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan; dan melalui pembayaran atau tunjangan kepada seseorang yang mengendalikan korban. Beberapa penelitian terhadap kasus tersebut seringkali menunjukkan bahwa anak-anak dan orang dewasa direkrut melalui sarana palsu janji daripada paksaan. Dalam perdagangan manusia yang terjadi di Filipina seharusnya diperketat lagi dalam pengamanan setiap orang yang masuk melalui kapal untuk ke destinasi yang dituju karena perdagangan manusia banyak dikirim melalui kendaraan laut. Pada tahun ke tahun perdagangan manusia di Filipina terus meningkat karena ketimpangan ekonomi yang terus terjadi, anak-anak maupun dewasa terus menjadi korban pelecehan seksual akibat *human trafficking* yang terus direkrut oleh *recruitment agency*. Kesadaran rendah bagi orang tua korban yang mendorong anak kandung mereka yang masih dibawah umur untuk mencari nafkah untuk orang tua mereka. Hal ini seharusnya ditanggulangi oleh Pemerintah Filipina.

Tinjauan Literatur

Untuk mengetahui sejauh mana konvensi PBB menangani *human trafficking* di negara Filipina dan juga mengetahui bagaimana *awareness* dan *response* keluarga di Filipina mengetahui anak mereka menjadi korban perdagangan manusia.

Human Trafficking

Menurut (Alexis A, 2009) Aronowitz dalam bukunya *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings; Sejak ratifikasi United Nations Trafficking Protocol*, hampir ada kesepakatan universal tentang definisi perdagangan manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan perdagangan manusia sebagai berikut:

Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, setidaknya, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Perdagangan harus terdiri dari :

1. Suatu tindakan (perekrutan, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang).
2. Melalui sarana (ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, atau memberikan pembayaran atau manfaat kepada orang yang mengendalikan korban).
3. Tujuan (untuk eksploitasi atau tujuan eksploitasi, yang termasuk mengeksploitasi prostitusi orang lain, bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik serupa, dan pengambilan organ).

The Domestic of Human Trafficking in the Philippines

Umur legal untuk *consensual sex* di Filipina yaitu 12 tahun, dengan adanya peraturan seperti itu yang memperbanyak khususnya anak dibawah umur untuk menjadi buruh kasar dengan hukum yang kurang mengikat. Maka dari itu, sampai saat ini pemberantasan perdagangan manusia di Filipina masih sangat susah untuk dijangkau karena dengan adanya peraturan hukum tertulis seperti itu memberi pengetahuan yang berbeda untuk anak dibawah umur. Seharusnya pemerintahan Filipina meningkatkan umur untuk melakukan *consensual sex* seperti diatas 18 tahun baru bisa dibilang legal secara hukum. Dengan adanya legalitas *consensual sex* berumur maksimal 12 tahun meningkatkan *sexual abuse* kepada anak-anak dibawah umur untuk lebih mudah untuk di *traffic* oleh group human trafficker. Perekonomian di Filipina yang juga mendorong banyak anak dibawah umur untuk menjadi prostitusi, diculik untuk diperdagang belikan oleh oknum-oknum yang bersangkutan. Dengan adanya *sex tourism, child prostitution* dan *human trafficking* semua berawal dari prinsip ekonomi. Orang tua korban yang tidak bisa menafkahi anak mereka dan memberikan solusi yang tidak baik untuk anak mereka. Kelompok

kriminal yang mendatangi kampung, atau kota dimana orang tua korban trafficker dijanjikan bahwa anak mereka akan diberi pekerjaan yang layak tetapi kenyataannya anak-anak dibawah umur tersebut dikirim ke berbagai negara untuk diperlakukan sebagai pekerja seks komersial. Menurut UNICEF, Sekitar 100,000 anak di Filipina yang dipaksa untuk masuk ke dalam *sex trade* setiap tahun. Mereka seringkali adalah anak-anak dari keluarga miskin yang tinggal di daerah kumuh dan pedesaan yang dilanda kemiskinan di negara itu, tempat mereka terjebak dan dieksploitasi oleh mucikari. 800,000 orang di Asia Tenggara terlibat dalam prostitusi.

Human Security

Menurut (United Nations Trust Fund for Human Security, 2010); Human Security untuk melindungi inti vital dari semua kehidupan manusia dengan cara yang meningkatkan kebebasan dan pemenuhan manusia. Keamanan manusia berarti melindungi kebebasan fundamental - kebebasan yang merupakan inti kehidupan. Ini berarti melindungi orang-orang dari ancaman dan situasi kritis (parah) dan meluas (meluas). Artinya menggunakan proses yang dibangun di atas kekuatan dan aspirasi masyarakat. Itu berarti menciptakan sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer dan budaya yang bersama-sama memberikan orang-orang blok bangunan untuk bertahan hidup, mata pencaharian dan martabat. Kebanyakan orang secara naluriah memahami apa arti keamanan. Itu berarti keamanan dari ancaman kelaparan, penyakit, kejahatan dan represi yang terus menerus. Itu juga berarti perlindungan dari gangguan mendadak dan menyakitkan dalam pola kehidupan kita sehari-hari-baik di rumah kita, dalam pekerjaan kita, di komunitas kita atau di lingkungan kita. (UNDP, 1994).

Menurut (S. Neil Macfarlane & Yuen Foong Khong, 2006), Intinya, keamanan manusia berarti keselamatan bagi orang-orang dari ancaman kekerasan dan non-kekerasan. Ini adalah kondisi atau keadaan yang dicirikan oleh kebebasan dari ancaman yang meluas terhadap hak-hak orang, keselamatan mereka, atau bahkan nyawa mereka. Dari perspektif kebijakan luar negeri, keamanan manusia mungkin paling baik dipahami sebagai pergeseran dalam perspektif atau orientasi. Ini adalah cara alternatif untuk melihat dunia, menjadikan orang sebagai titik rujukannya, daripada berfokus secara eksklusif pada keamanan wilayah atau pemerintah. Menurut Charles Tilly, 1985, para pembela untuk pemerintah tertentu dan untuk pemerintah secara umum umumnya berargumen, tepatnya, bahwa mereka menawarkan perlindungan dari kekerasan lokal dan eksternal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk & Miller dalam (Nasution, 1988) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Lalu mereka mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kaitannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang

membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Pengamatan kualitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Untuk itu pengamat-pengamat mulai mencatat atau menghitung dari satu, dua, tiga, dan seterusnya. Berdasarkan pertimbangan dangkal demikian, kemudian peneliti menyatakan bahwa penelitian kuantitatif mencakup setiap penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata dan perhitungan statistik lainnya. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang sedang berlangsung pada saat ini dan masa lampau. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini, diharapkan dapat menjelaskan atau menggambarkan kondisi pada masa lampau dan kondisi pada saat ini. Terkait dengan penelitian dimaksud, diharapkan dapat menjelaskan kondisi kondisi saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wacana anti-perdagangan orang telah menunjukkan polarisasi perdebatan tentang legalisasi prostitusi sebagai sarana memerangi perdagangan seks perempuan. Debat internasional tentang *trafficking* ini bermula dari debat feminis tentang prostitusi dan pornografi. Sebagai hasil dari perdebatan ini, satu kubu menentang legalisasi prostitusi dan berpendapat bahwa prostitusi tidak pernah bisa menjadi pekerjaan sukarela dan selalu dipaksakan karena prostitusi didasarkan pada dominasi sistemik laki-laki atas perempuan dan secara intrinsik dan inheren merupakan bentuk modern dari perbudakan seks yang berbahaya, tidak manusiawi, dan eksploitatif. Kubu lain mempromosikan legalisasi prostitusi dan berpendapat bahwa stigmatisasi prostitusi mewakili kontrol hegemonik atas perempuan dan legalisasi prostitusi akan mengembalikan kontrol dan agensi perempuan atas tubuh mereka sendiri. Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional-Global Alliance Against Trafficking (GATW) dan Coalition Against Trafficking Women (CATW) dalam gerakan anti-trafficking mewujudkan dua pandangan yang berlawanan ini. Selagi CATW berpendapat bahwa melegalkan prostitusi adalah cara yang efektif untuk memerangi trafficking, GATW berpendapat bahwa melegalkan prostitusi dapat mengurangi trafficking karena legalitas profesi inilah yang memicu perdagangan.

Badan-badan perjanjian ditugaskan untuk mengevaluasi kinerja negara terhadap standar universal ini. Namun, dengan cara lain, analisis dan pemantauan hak asasi manusia sangat tidak sesuai dengan indikator, terutama indikator gabungan yang menetapkan angka atau peringkat tunggal untuk kinerja agregat suatu negara. Banyak komunitas hak asasi manusia yang skeptis tentang nilai indikator untuk mengukur hak asasi manusia. Pemantauan hak asasi manusia berfokus pada kondisi yang paling rentan dan mengadvokasi kebijakan dan undang-undang khusus untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dengan demikian, analisis biasanya spesifik secara historis dan kontekstual.

PEMBAHASAN

Penyelundupan migran didefinisikan sebagai pergerakan ilegal orang melintasi perbatasan internasional untuk mendapatkan keuntungan finansial di bawah Protokol Penyelundupan PBB (2000). Sementara perdagangan manusia diikuti dengan eksploitasi manusia, jasa para penyelundup dianggap berakhir ketika para migran mencapai tujuan mereka. Lebih lanjut, sementara kriteria utama yang membedakan perdagangan manusia di bawah Protokol PBB adalah adanya korban yang hak-hak individunya dilanggar, penyelundupan dipandang sebagai pelanggaran kepentingan politik negara (Kelompok Pakar Perdagangan Manusia, 2004).

The Global Trade in Human Beings

Menurut data penelitian International Organization for Migration dalam perdagangan manusia global yaitu di Amerika Serikat, perdagangan manusia juga menjadi masalah yang terkenal. Pada bulan Oktober 2001, Departemen Luar Negeri AS membentuk Kantor untuk memantau dan memerangi perdagangan manusia, yang menerbitkan laporan tahunan yang menilai upaya global untuk memerangi perdagangan manusia. Dalam laporan bulan Juni 2004, Departemen Luar Negeri meninjau upaya yang dilakukan oleh 140 pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia di seluruh dunia. Pendanaan untuk program penanggulangan perdagangan manusia juga telah meningkat secara substansial tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2003 Pemerintah AS sendiri mendukung 190 program anti perdagangan manusia di 92 negara dengan total US \$ 72 juta, meningkat dari 118 program di 55 negara pada TA 2001 (Pemerintah AS, 2004).

Pada bulan Oktober 1994, IOM menyelenggarakan konferensi global di Jenewa, bertajuk Tanggapan Internasional untuk Perdagangan Migran dan Pergerakan migrasi internasional akan dianggap “*trafficking*” jika kondisi berikut terpenuhi:

1. Uang (atau bentuk pembayaran lain) berpindah tangan.
2. Seorang fasilitator - pedagang - dilibatkan.
3. Melintasi perbatasan internasional.
4. Masuknya ilegal.
5. Gerakan ini bersifat sukarela.

Definisi di atas lebih mirip dengan definisi internasional tentang penyelundupan manusia saat ini. Menurut Konvensi PBB tahun 2000 tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, 'penyelundupan migran' berarti pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, materi keuangan atau lainnya keuntungan, masuknya seseorang secara ilegal ke negara pihak di mana orang tersebut berada bukan warga negara atau penduduk tetap”. Pada akhir 1990-an, pendekatan yang lebih luas dan lebih inklusif dikembangkan, menghasilkan definisi perdagangan yang lebih luas, yang termasuk dalam “Persatuan Protokol Negara untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, melengkapi Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional”, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada akhir tahun 2000: “Perdagangan orang”

berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan, atau pemberian pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anak Dibawah Umur atau Orang Dewasa Dapat Dipengaruhi Kedalam Slavery dan Human Trafficking di Filipina.

Menurut (Shashi Punam & Sandeep Sharma, 2018) perdagangan manusia dapat terjadi dimana saja, selama lingkungan mengandung kondisi yang rentan. Perdagangan manusia bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi biasanya memangsa situasi yang rentan. Orang-orang dalam situasi rentan dan genting mencari jalan keluar dan dalam keputusan mereka dapat menjadi mangsa pedagang manusia. Trafficking merupakan fenomena kompleks yang sering didorong atau dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya dan faktor lainnya. Setiap tahun, ribuan pria, wanita dan anak-anak jatuh ke tangan para pedagang manusia, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Banyak dari faktor-faktor ini khusus untuk pola perdagangan individu dan untuk negara bagian di mana mereka terjadi. Saat ini, banyak negara bekerja sama untuk mengurangi penyebab perdagangan manusia.

Laporan Perdagangan Orang Departemen Luar Negeri AS adalah sumber daya paling komprehensif di dunia tentang upaya anti-perdagangan manusia, termasuk 188 negara dan wilayah. Berlawanan dengan keinginan mereka, jutaan orang di seluruh dunia dipaksa bekerja untuk keuntungan orang lain, misalnya dengan mengemis, prostitusi, perbudakan paksa, bekerja di sweatshop, dan lain-lain. Menurut beberapa perkiraan, sekitar 80% perdagangan melibatkan eksploitasi seksual, dan 19% melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Ada sekitar 20 hingga 30 juta budak di dunia saat ini. Perdagangan manusia adalah kejahatan tersembunyi karena korban jarang datang ke depan untuk mencari bantuan karena hambatan bahasa, ketakutan akan pedagang, atau ketakutan akan penegakan hukum. Mengingat makalah ini telah membahas akar penyebab perdagangan dari satu negara ke negara lain. Dalam makalah ini ditemukan dengan bantuan sumber sekunder bahwa perdagangan manusia dapat dipisahkan menjadi perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja. Menurut (Celia Leones and Donna Caparas, 2003) perdagangan manusia memiliki tujuan yang berbeda, ada kecenderungan umum yang menjelaskan akar penyebab perdagangan manusia secara keseluruhan seperti kemiskinan, perang, bencana alam dan pencarian kehidupan yang lebih baik dan perdagangan manusia menghasilkan keuntungan besar adalah penyebab perdagangan manusia.

Perdagangan manusia biasanya melibatkan praktik-praktik terlarang seperti perekrutan oleh agen perekrutan malafide, penculikan, dan meninggalkan negara melalui “Pintu Belakang Selatan” tanpa dokumentasi yang sah. Namun, praktik perdagangan dapat dimulai melalui agen perekrutan berlisensi yang berfungsi sebagai garda depan untuk perdagangan seks. Dalam kasus seperti itu, semua surat perjalanan diproses secara legal tetapi klien biasanya tertipu mengenai jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan setelah tiba di negara tujuan.

Meskipun ada jalur yang sah, banyak calon pekerja asing memilih untuk melewati jalur tersebut. Diyakini bahwa persyaratan pemerintah yang ketat dan prosedur yang sulit dan memakan waktu telah mengecilkan hati para pencari kerja untuk mencari jalur hukum dan telah mengarahkan mereka untuk beralih ke cara-cara ilegal yang sebagian besar dipandang lebih cepat dan tidak rumit.

Masalah Ekonomi Filipina

Menurut (Batalla, Eric Vincent C, 2016) menjelang pemilihan nasional 2016, momok otoritarianisme mulai menghantui demokrasi EDSA Filipina. Dalam pemilihan wakil presiden, putra dan senama mendiang diktator, Ferdinand Marcos, Jr, memimpin pemilihan pada akhir Maret dengan selisih 6 persen atas kandidat pemerintahan, Leonor Robredo. Keunggulan tersebut mendorong pasukan anti Marcos untuk berkampanye dengan penuh semangat dan mencela darurat militer dengan slogan, “Jangan lagi.” Jajak pendapat keluar sebagian dari Social Weathers Station yang dirilis pada bulan Mei masih menunjukkan keunggulan Marcos, meskipun telah dipersempit dan secara praktis terkait dengan Robredo, dengan 34,9 persen ke Marcos dan 32,5 persen ke Robredo. Robredo, istri mantan walikota Naga City dan kemudian sekretaris pemerintah daerah yang meninggal dalam kecelakaan pesawat beberapa tahun lalu, disadap pada menit terakhir oleh Partai Liberal setelah gagal mengamankan Senator Grace Poe sebagai calon wakil presiden, pembawa standar kepresidenannya Mar Roxas. Kemenangan Robredo atas Marcos, meskipun dengan selisih kecil dan dinodai oleh tuduhan kecurangan pemilu, mewakili penolakan kembalinya keluarga Marcos ke kekuasaan presiden, di mana wakil presiden dianggap sebagai batu loncatan. Dalam perebutan kursi kepresidenan, Rodrigo Duterte muncul sebagai kandidat kejutan. Mantan walikota Kota Davao, yang mencalonkan diri di bawah panji Partido Demokratiko Pilipino-Lakas Bayan (PDP-Laban atau Partai Demokrat Filipina-Kekuatan Rakyat), dengan cepat memimpin pemilihan setelah debat presiden pertama diadakan pada bulan Februari. Beberapa pengamat melihat pemilihan presiden sebagai pertarungan antara kontinuitas dan perubahan. Duterte mewakili perubahan (sebenarnya, slogan kampanyenya adalah “Perubahan Akan Datang”), penolakan terhadap pemerintah Aquino, dan bahkan pendirian EDSA yang ditegakkan oleh konstitusi 1987. Selain daya tarik populer, kampanyenya mendapat manfaat dari dukungan yang diberikan oleh mantan presiden Gloria Arroyo dan Fidel Ramos dan sekutu mereka.

Di sisi lain, kandidat administrasi Mar Roxas (dari Partai Liberal yang berkuasa) melambangkan kelangsungan platform pemerintah Aquino, Daang Matuwid (Jalan Lurus). Meskipun menderita karena kurangnya popularitas dan dari rekam jejak politik pemerintah sendiri, Roxas berhasil menempati posisi kedua, dengan dukungan besar-besaran yang datang dari keluarga elit lama, sambil diuntungkan dari pengoperasian mesin pemerintah. Duterte dipandang sebagai politisi yang jujur dan garis keras, tetapi kurang ajar dan tidak sopan, yang gaya kepemimpinannya paling cocok dengan politik kota di pulau selatan Mindanao yang sarat konflik. Namun, kualitas-kualitas ini telah membuatnya disayangi oleh sebagian besar populasi pemilih. Selain itu, kenaikan Duterte mencerminkan kebencian publik terhadap ketidakmampuan lembaga yang ada untuk secara efektif

mengendalikan kejahatan, korupsi, dan perdagangan narkoba. Pada tanggal 9 Mei, di bawah platform reformasi ini, Duterte menang telak, mengumpulkan rekor bersejarah 16,6 juta suara, lebih tinggi dari 15,2 juta suara yang diterima oleh pendahulunya, Benigno Aquino III, pada tahun 2010. Presiden baru telah menjadi kontroversial. pemimpin, bahkan sejak awal. Pernyataan publiknya termasuk makian memiliki efek antagonis, mengasingkan para pemimpin Gereja Katolik, media massa, Amerika Serikat dan PBB. Selama masa kampanye, ia secara terbuka mempermainkan gagasan untuk mendirikan pemerintahan satu orang, yang semakin mengkhawatirkan kekuatan-kekuatan mapan. Setelah pemilihannya, rentetan pembunuhan terkait narkoba yang diyakini didukung oleh pemerintah baru telah menambah kecemasan, bahkan di antara para pendukung presiden.

Perbudakan dan Eksploitasi

Menurut (United Nations Human Rights, Human Rights and Human Trafficking, 2014), banyak dari praktik yang terkait dengan perdagangan modern jelas dilarang di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Misalnya, hukum hak asasi manusia melarang jeratan utang: penjaminan jasa pribadi sebagai jaminan utang di mana nilai jasa tersebut tidak diterapkan terhadap likuidasi utang atau panjang atau sifatnya tidak dibatasi dan ditentukan. Banyak orang yang diperdagangkan yang berhutang dengan pengeksploitasi mereka (berkaitan dengan, misalnya, biaya penempatan atau transportasi) menemukan diri mereka dalam situasi jeratan utang; utang digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan mengeksploitasi mereka. Hukum hak asasi manusia juga melarang kerja paksa, yang didefinisikan oleh Konvensi No. 29 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sebagai: “semua pekerjaan atau jasa yang dituntut dari setiap orang di bawah ancaman hukuman apapun dan untuk itu orang tersebut belum menawarkan dirinya [dirinya] secara sukarela”. Perbudakan, penghambaan, eksploitasi seksual anak, pernikahan paksa, bentuk-bentuk pernikahan budak, pernikahan anak, prostitusi paksa dan eksploitasi prostitusi juga merupakan praktik-praktik yang terkait dengan perdagangan manusia yang dilarang menurut hukum hak asasi manusia internasional.

Perdagangan orang adalah kejahatan serius dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Perspektif hak asasi manusia dan evaluasi ulang yang diperlukan. Argumen telah sering dibuat baru-baru ini bahwa konsep umum hak asasi manusia mungkin tidak cukup untuk mendefinisikan secara akurat kewajiban negara dalam bidang penghukuman dan penuntutan atas perilaku tertentu dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Tuduhan yang sama sering dibuat tentang korban kekerasan dalam rumah tangga. Setiap tahun, ribuan pria, wanita dan anak-anak jatuh ke tangan para pedagang, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Hampir setiap negara di dunia terkena dampak trafficking, baik sebagai negara asal, transit maupun tujuan para korban. Perdagangan manusia dapat terjadi dimana saja, selama lingkungan mengandung kondisi yang rentan. Perdagangan manusia bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi biasanya memangsa situasi yang rentan. Orang-orang dalam situasi rentan dan genting mencari jalan keluar dan dalam keputusan mereka dapat menjadi mangsa pedagang manusia. Trafficking

merupakan fenomena kompleks yang sering didorong atau dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya dan faktor lainnya.

Penyelesaian PBB terhadap Human Trafficking dan Sistem Politik di Filipina

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) bersama dengan Institut Penelitian Kejahatan dan Keadilan Antar-Kawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICRI) meluncurkan Program Global Melawan Perdagangan Manusia (GPAT) pada Maret 1999. Dalam upaya untuk lebih memungkinkan pemerintah untuk menanggapi isu perdagangan manusia dan penyelundupan migran, GPAT bertujuan untuk menjelaskan proses penyelundupan manusia dan perdagangan manusia serta keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir di dalamnya, dan mempromosikan pengembangan tanggapan peradilan pidana yang efektif untuk ini masalah. GPAT terdiri dari penelitian yang berorientasi pada kebijakan dan kerjasama teknis yang ditargetkan. UNICRI bertanggung jawab untuk pengembangan dan koordinasi kegiatan penelitian termasuk pembuatan instrumen survei standar dan metodologi penelitian untuk proyek-proyek dalam kerangka GPAT. Studi UNICRI bertujuan untuk mengumpulkan data tentang rute yang berbeda dari penyelundupan dan perdagangan manusia, modalitas yang digunakan untuk merekrut, mengangkut dan kemudian mengeksploitasi korban, organisasi kriminal yang terlibat dalam kegiatan ini serta tanggapan LSM dan pemerintah terhadap masalah tersebut.

Dalam konteks Koalisi Proyek PBB Melawan Perdagangan di Filipina, Fase 1, wawancara dengan pejabat pemerintah di Filipina menunjukkan fakta bahwa pemerintah sangat peduli dengan kesejahteraan perempuan yang telah diperdagangkan ke Jepang dan dieksploitasi dalam seks. industri. Ada indikasi bahwa perempuan-perempuan ini berada di bawah kendali kejahatan terorganisir Jepang (Heazle, 1993). Studi file kasus, bagaimanapun, mengungkapkan bahwa sejumlah besar wanita Filipina jatuh berdo'a kepada para pedagang di Korea.

Pusat Kejahatan Transnasional Filipina (PCTC) melaporkan, bagaimanapun bahwa Jepang tidak lagi menjadi tujuan favorit bagi "penghibur" Filipina dan hanya setengah dari 150.000 penghibur yang tetap berada di Jepang. Setengah lainnya mencari pekerjaan di Kanada, Nigeria, Timur Tengah dan negara-negara lain (Cascolan, 2000). Laporan lain menunjukkan bahwa sementara Timur Tengah telah menjadi tujuan tradisional pekerja Filipina di masa lalu, tren telah berubah dalam beberapa tahun terakhir dan pada September 1999, negara-negara Asia menyumbang lima dari 10 tujuan teratas pekerja migran Filipina.

Pada usianya yang ke-71 tahun, Rodrigo Roa Duterte yang dikenal dengan sebutan Digong memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat Presiden Filipina pada pemilihan umum tahun 2016. Melalui riwayat politiknya, Duterte dikenal sebagai seorang pemimpin yang terang-terangan, tegas, dan terkenal dengan kebijakan untuk memberantas kejahatan yang sudah terbukti selama kurang lebih 30 tahun masa baktinya sebagai pejabat daerah di Davao. Selama masa kepemimpinannya di Davao, Duterte mengerahkan polisi setempat untuk melakukan patroli setiap malam untuk mengawasi tindakan kriminal dalam bentuk apapun. Sosok yang dikenal dengan sebutan Digong ini juga melakukan patroli dengan

sepeda motornya, mengelilingi kota Davao bersama pihak kepolisian. Pencalonan diri Duterte sebagai calon Presiden Filipina untuk periode 2016-2022 membawa harapan baru bagi masyarakat Filipina yang optimis terhadap kebijakan anti tindakan kriminal dan anti terorismenya. Namun tidak sedikit juga yang merasa khawatir mengenai kebijakan anti tindakan kriminal Duterte yang mengusung konsep eksekusi tanpa peradilan bagi mereka yang melakukan tindak kriminal, terutama terkait kasus obat-obatan terlarang. Bahkan presiden pertahanan saat itu, Benigno Aquino III, mengungkapkan ketakutan akan terciptanya sistem pemerintahan yang otoriter dan bertentangan dengan hukum HAM jika Duterte menjadi Presiden dan menerapkan kebijakan anti tindakan kriminalnya. Sosok Duterte juga dianggap sebagai sosok pemimpin yang kontroversial tidak hanya dari kebijakan-kebijakannya, namun juga perkataannya yang terang terangan, yang bagi sebagian orang tidak patut diucapkan oleh seorang pemimpin.

Duterte pernah melampiasikan kekesalannya kepada mantan Presiden AS, Barack Obama dengan menyebut presiden kulit hitam pertama Amerika tersebut “son of whore” serta beberapa ungkapan kasarnya terhadap perwakilan AS di Filipina, Philip Goldberg. Namun disamping berbagai kontroversi dan gambaran negatif tentang dirinya, lebih dari 14 juta masyarakat Filipina menjagokan sosok yang dijuluki “the punisher” ini sehingga berhasil memenangi kursi kepresidenan untuk periode 2016-2022.

Duterte memperoleh 38.51% suara melalui pemilihan yang mengikutsertakan lima calon presiden dan enam calon wakil presiden. Duterte unggul hampir 6 juta suara dari pesaing dengan selisih jumlah suara terdekat Mar Roxas. Duterte kemudian dilantik dan mengambil sumpah sebagai Presiden resmi Filipina pada 30 Juni 2016, bersama dengan wakil presidennya, Leni Robredo yang berhasil memenangi 13 juta suara pada pemilihan wakil presiden mengalahkan lima pesaingnya. Berbeda dengan beberapa negara demokratis bahkan mitra tradisionalnya, Amerika Serikat, pemilihan presiden dan wakil presiden di Filipina dilakukan secara terpisah. Hal ini diyakini sebagai salah satu cara untuk menghindari korupsi di kalangan pemerintah pusat sehingga masa bakti terhadap masyarakat tidak dipengaruhi kepentingan kelompok maupun individu. Setelah dilantik menjadi Presiden Filipina pada Juni 2016, nama Presiden Duterte menjadi sorotan media nasional maupun internasional. Tidak hanya karena gaya bicaranya yang spontan dan cenderung tidak sopan, namun juga kontroversi yang dimunculkannya melalui kebijakan luar negerinya. Presiden Rodrigo Duterte mengusung sebuah kebijakan luar negeri yang diberi judul besar Independent Foreign Policy. Salah satu yang menarik perhatian masyarakat domestik maupun internasional adalah kebijakan anti-Amerika Duterte. Istilah Independent Foreign Policy sendiri bukanlah hal baru dalam menentukan arah kebijakan luar negeri di Filipina.

SIMPULAN

Pemerintah Filipina dalam aspek lain, diharapkan agar meningkatkan kestabilan perekonomian kaum miskin dan bukan hanya untuk kaum borjuis. Perdagangan manusia yang terjadi di Filipina disebabkan oleh ketimpangan

ekonomi untuk masyarakat Filipina dan pemerintahan Filipina tidak membantu kesejahteraan penduduk Filipina itu sendiri. Perdagangan manusia yang terus terjadi akan merusak banyak masa depan anak-anak perempuan di bawah umur tentunya. Maka dari itu Pemerintah Filipina seharusnya melakukan hal-hal berikut:

1. Bantuan dari Pemerintah di Filipina sangatlah penting dalam memberantas Human Trafficking yang tidak pernah ada hentinya.
2. Ketimpangan Ekonomi yang terus terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan bagi orang yang tidak mempunyai edukasi atau bantuan dari Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian bagi orang miskin di Filipina.
3. Pemerintah Filipina sepatutnya memiliki konsistensi dalam menjunjung sebuah hak asasi manusia agar semua kelas masyarakat mendapatkan kesetaraan dalam hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Aronowitz, Alexis A. (2009). *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings (Global Crime and Justice)*. New York: United Nations.

Badley, Christopher A.; Madrid, Susan; Simkhada Padam; King, Kathleen; and Young, Loretta. (2017). "Adolescent Girls Offered Alternatives to Commercial Sexual Exploitation: A Case Study from the Philippines" *Dignity: A Journal on Sexual Exploitation*: Vol. 2: Iss 2, Article 8.

Batalla, Eric Vincent C. (2016). Divided Politics and Economics Growth in the Philippines: in. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. Germany: GIGA.

Cascolan, C. (2000). *Directorate for Research, The Philippine Experience in Trafficking Persons*. Manila: Philippines Center on Transnational Crime.

Celia Leones and Donna Caparas. (2003). *Trafficking Human Beings from the Philippines : Survey of Government Experts and Law Enforcement Case Files*. Philippines: United Nations Global Programme.

Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Shashi Punam & Sandeep Sharma. (2018). *Human Trafficking: Causes and Implications*. 2018. Hamirpur: Career Point University.

S. Neil Macfarlane and Yuen Foong Khong. (2006). *Human Security and the UN: A Critical Histor..* Indianapolis: Indiana University Press.

United Nations Human Rights. Human Rights and Human Trafficking: Fact Sheet No. 36. 2014. New York and Geneva: United Nations.

United Nations Trust Fund for Human Security. (2010). *Human Security In Theory And Practice: Application of the Human Security Concept and The United Nations Trust Fund for Human Security.*